

PENGARUH PENGANGGURAN, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INFLASI TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2016-2020

Juvico Akbar Karuniawan¹, Aris Soelistyo²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang

Email: juviko15@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengangguran, pengeluaran pemerintah dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder Indonesia dari tahun 2016-2020. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data time series dengan model Least Square Dummy Variable (LSDV). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sebesar 3.559197; (2) variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan sebesar -2.062619; (3) variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan sebesar -0.116989; (4) variabel pengangguran dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan sedangkan variabel inflasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Kata Kunci: Pengangguran; Pengeluaran Pemerintah; Inflasi; Kemiskinan.

Abstract

This study aims to determine the effect of unemployment, government spending and inflation on poverty in Indonesia in 2016-2020. This study uses a quantitative approach. The data used is Indonesian secondary data from 2016-2020. The data analysis technique in this study uses time series data analysis with the Least Square Dummy Variable (LSDV) model. The results of the study show that: (1) The unemployment variable has a positive and significant effect on poverty by 3.559197; (2) Government expenditure variable has a negative and significant effect on poverty by -2.062619; (3) The inflation variable has a negative and insignificant effect on poverty by -0.116989; and (4) The variables of unemployment and government spending simultaneously affect poverty while the inflation variable simultaneously does not affect poverty.

Keywords: Unemployment; Government Spending; Inflation; Poverty.

A. PENDAHULUAN

Text Berbicara tentang kemiskinan merupakan persoalan yang tidak pernah luput dari perhatian suatu pemerintahan negara khususnya di Indonesia (Mustamin & Nurbayani, 2015). Dalam ekonomi kemiskinan merupakan salah satu gambaran penghambat bagi suatu negara untuk maju dan berkembang. Indonesia yang sebagai salah satu negara yang masuk dalam kategori berkembang, menyadari hal ini akan pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan, berupaya mengusahakan segala cara untuk menemukannya dalam agenda tahunan pemerintahan (Kasim et al., 2021; Putri & Putri, 2021)

Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian di hampir setiap negara, terlebih di negara berkembang seperti Indonesia ini. Yang memiliki tingkat kemiskinan yang masif. Tingginya kemiskinan yang terjadi biasanya di sebabkan oleh ketidakmampuan

seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga dikatakan miskin jika pendapatan yang dimiliki tidak mampu menutupi kebutuhan hidupnya (Sinaga, 2022; Sunusi, 2014).

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan hidup (*basic needs approach*). Dengan pendekatan tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari segi pengeluaran. Yang berarti penduduk miskin ialah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (Amalia, 2012).

Indonesia yang menjadi salah satu negara terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk kurang lebih mencapai 270 juta jiwa memiliki masalah kemiskinan yang serius, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Waruwu pada tahun 2016. Ketidakmerataan pendapatan, peluang kerja, harga bahan pangan dan infrastruktur antara daerah satu dengan lainnya menjadi kendala di setiap daerah atau provinsi, Terkhususnya di 34 provinsi yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian akan menguji apakah pengangguran, pengeluaran pemerintah dan inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2016-2020.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian Diah Retnowati & Harsuti (2015), berjudul “Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah” menjelaskan bahwa metode yang digunakan adalah dianalisis secara kuantitatif, variabel yang digunakan yaitu pengangguran kemiskinan. Lalu hasil penelitiannya ialah pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Kenaikan tingkat pengangguran yang bertanda positif akan mengakibatkan kemiskinan menguat. Ketika pengangguran meningkat maka diikuti pula oleh peningkatan kemiskinan. Dampak dari pengangguran sendiri mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat kemakmuran yang akan dicapai.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah objek dalam penelitian dimana penelitian ini dilakukan di seluruh provinsi Indonesia, sedangkan dalam penelitian terdahulu dilakukan di Jawa Tengah. Akan tetapi dalam kedua penelitian ini memiliki persamaan pembahasan yaitu membahas pengangguran dan kemiskinan.

Kedua, Penelitian Nengah Rai Narka Suda Pratama, Made Suyana Utama (2019), berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali” menjelaskan bahwa metode yang digunakan adalah dianalisis secara kuantitatif. Variabel yang digunakan yaitu pengeluaran pemerintah, investasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan. Lalu hasil penelitiannya ialah pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan investasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Artinya pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah merupakan syarat bagi pengurangannya kemiskinan. Adanya pengeluaran pemerintah digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja daerah untuk penyediaan infrastruktur. Serta diarahkan penggunaannya sesuai kebutuhan daerah akan infrastruktur publik, sehingga mampu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari belanja daerah digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dan menurunkan kemiskinan agar tercapai sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah objek dalam penelitian dimana penelitian ini dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di kabupaten/kota provinsi Bali. Akan tetapi kedua penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan.

Ketiga, Penelitian Meinny Kolibu, Vekie A. Rumat, Daisy S. M. Engka (2017) berjudul: “Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat

Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara” menjelaskan bahwa metode yang digunakan adalah dianalisis secara deskriptif. Variabel yang digunakan yaitu inflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan. Lalu hasil penelitiannya ialah secara parsial tingkat inflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara. Dijelaskan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan ini tentu tidak sejalan dengan hipotesis yang mengatakan inflasi memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan teori dimana inflasi berpengaruh positif bagi tingkat kemiskinan. Inflasi merupakan determinan makro ekonomi bagi perubahan kondisi kemiskinan disuatu negara. Penduduk miskin tidak akan terpengaruh pada tingkat inflasi karena pada dasarnya penduduk miskin tidak memiliki daya beli, sehingga walaupun terjadi inflasi mereka tetap tidak mempunyai daya beli. Dijelaskan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dalam kasus ini hubungan antara pengangguran dan kemiskina tidak selalu sesuai dengan asumsi teori ekonomi yang ada.

Fenomena ini dijelaskan bahwa orang yang menganggur dalam sebuah rumah tangga. Tetapi ada anggota keluarga lainnya yang berkerja dengan tingkat pendapatan yang tinggi, sehingga cukup untuk menyokong pengangguran sehingga pengangguran yang ada di dalam rumah tersebut tidak otomatis menjadi miskin, yang diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan Lestari et al. (2018), dan Barika (2013). Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah objek penelitian dimana penelitian ini dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di provinsi Sulawesi Utara. Akan tetapi kedua penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas pengaruh inflasi terhadap kemiskinan.

Tujuan penelitian yang ini dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah pertama, untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia dalam kurung waktu 2016 sampai dengan 2020. Kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia dalam kurung waktu 2016 sampai dengan 2020. Ketiga, untuk mengetahui apakah ada pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia dalam kurung waktu 2016 sampai dengan 2020.

B. METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi berada di Indonesia berjumlah 34 provinsi. Sample dalam penelitian ini adalah kemiskinan, pengangguran, pengeluaran pemerintah dan inflasi di setiap provinsi di Indonesia. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yang di peroleh dari data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Metode dokumentasi dilakukan dengan mencatat dan mengumpulkan data data yang tercatat di Badan Pusat Statistik Indonesia seperti data tentang kemiskinan, pengangguran, pengeluaran pemerintah dan inflasi

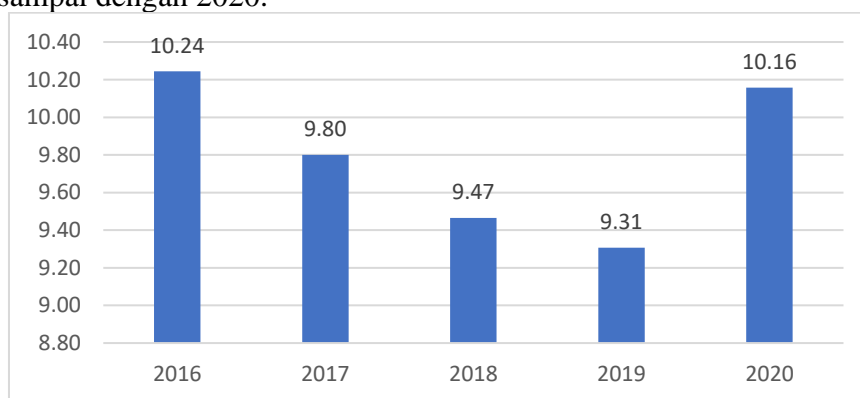
Analisi data dalam penelitian ini yaitu menyimpulkan dan menginterpretasikan kondisi di setiap provinsi dan menjawab persoalan yang ada terkait pengaruh pengangguran, pengeluaran pemerintah dan inflasi. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan hasil dokumentasi pada 34 provinsi untuk menjelaskan masing masing objek penelitian dengan menggambarkan secara objektif melalui data, angka dan gambar. Untuk menganalisis data dalam kurun waktu tertentu peneliti menggunakan regresi data panel sebagai memecahkan masalah dalam penelitian ini. Model regresi data panel menggunakan data cross section dan time series sehingga mengingat data panel merupakan gabungan dari data time series dan cross section, persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut: $Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 x_{2it} + \beta_3 x_{3it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots (1)$

Keterangan:

- Y = Kemiskinan
 A = Konstanta
 B = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
 x_1 = Pengangguran
 x_2 = Pengeluaran pemerintah
 x_3 = Inflasi
 e = Error term
 t = Waktu
 I = Provinsi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, makanan, pakaian dan tempat berlindung. Kata miskin sendiri identik dengan suatu kondisi seseorang yang tidak berharta, atau serba kekurangan. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia Berikut Gambar tingkat kemiskinan di Indonesia kurun waktu 2016 sampai dengan 2020.



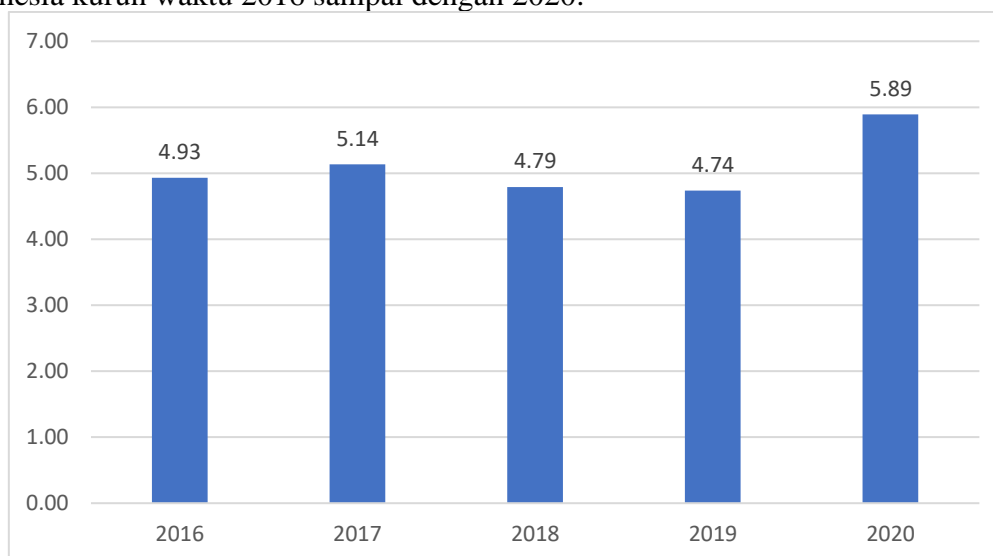
Gambar 1. Perkembangan Kemiskinan di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Data Diolah (2022)

Berdasarkan Gambar 1, diketahui angka kemiskinan di Indonesia yang di ukur dari penduduk miskin, secara umum kemiskinan di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari tahun 2016 kemiskinan mencetak presentase tertinggi sebesar 10.24 persen. Di tahun 2017 menurun menjadi 9.80 persen. Di tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 9.47 persen, dan di tahun 2019 sebesar 9.31 persen. Dan di tahun 2020 kemiskinan mengalami penguatan kembali menjadi 10.16 persen. Penurunan yang terjadi pada tahun 2016 sampai dengan 2019 terjadi dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, keberhasilan dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Namun dalam kondisi ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 2020 kemiskinan kembali mengalami kenaikan dikarenakan pandemi covid yang memicu penurunan pendapatan masyarakat hampir di seluruh kalangan masyarakat. Dalam kelompok masyarakat ini dinilai paling rentan jatuh miskin karena pendapatan yang menurun. Sehingga kebutuhan seseorang akan terbebani dengan pendapatan yang menurun.

Pengangguran di ambil dari pengangguran terbuka ialah presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (BPS, 2012). Ciri dari pengangguran terbuka yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari kerja, mereka tidak mempunyai pekerjaan dan sedang menyiapkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai kerja. Jumlah pengangguran memiliki hubungan sangat erat dengan kemiskinan. Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan kemiskinan adalah

sama pentingnya (Mahendra, 2020). Secara jika masyarakat tidak menganggur berarti memiliki pekerjaan dan penghasilan. Dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi maka tidak akan terjerat kemiskinan. Sehingga dengan tingkat pengangguran yang rendah dan kesempatan dalam mendapatkan kerja tinggi maka tingkat kemiskinan juga rendah. Berikut pengangguran di Indonesia kurun waktu 2016 sampai dengan 2020.



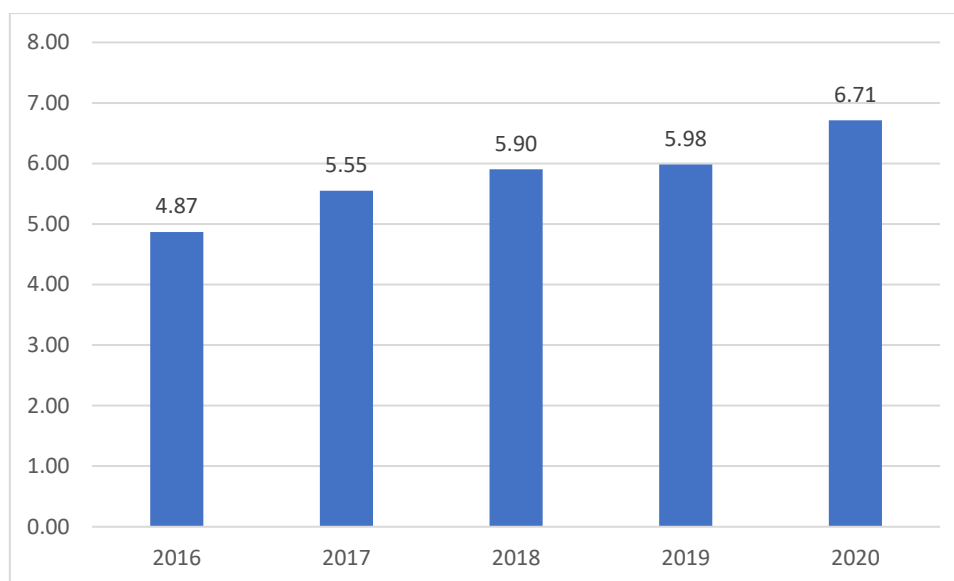
Gambar 2. Perkembangan Pengangguran di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Data Diolah (2022)

Berdasarkan gambar 2, menunjukkan hasil bahwa secara umum pengangguran memiliki laju pergerakan fluktuatif. Dimana pada tahun 2016 pengangguran sebesar 4.93 persen. Di tahun selanjutnya 2017 pengangguran naik menjadi 5.14 persen. Di tahun berikutnya 2018 pengangguran mengalami penurunan menjadi 4.79 persen. Di 2019 mengalami penurunan menjadi 4.74 persen. Dan di 2020 pengangguran mengalami kenaikan tinggi mencapai 5.89 persen.

Pada tahun 2016 sampai tahun 2017 terjadi kenaikan pada pengangguran. Salah satu sebab kenaikan tersebut adalah kenaikan jumlah angkatan kerja yang tidak mampu diserap oleh industri lain. Sedangkan tahun 2017 sampai dengan 2019 pengangguran mengalami penurunan dikarenakan meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia serta sejumlah proyek pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang dilakukan pemerintah turut berdampak pada pengurangannya pengangguran. Sedangkan dari tahun 2019 sampai dengan 2020 pengangguran kembali naik dikarenakan hadirnya pandemi Covid-19 yang memicu pengurangannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh industri. Yang mengakibatkan pengurangan pada jumlah tenaga kerja yang tersedia.

Pengeluaran pemerintah ialah seperangkat produk yang dihasilkan memuat pilihan atau keputusan yang di buat oleh pemerintah untuk nantinya menyediakan barang-barang publik dan juga pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah adalah jumlah dari keseluruhan dari keputusan anggaran masing-masing tingkat pemerintah meliputi tingkat pemerintah pusat, tingkat pemerintah provinsi, dan tingkat pemerintah daerah. Untuk melihat terperinci pengeluaran pemerintah berikut Gambar tingkat kemiskinan di Indonesia kurun waktu 2016 sampai dengan 2020.

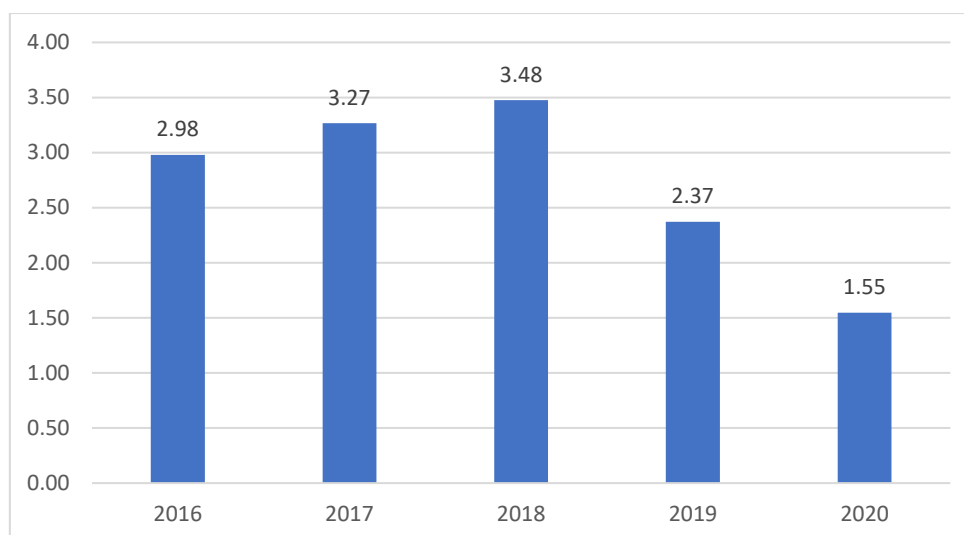


Gambar 3. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Data Diolah (2022)

Berdasarkan Gambar 3, menunjukkan pergerakan dari Gambar pengeluaran pemerintah dari tahun 2016 sampai dengan 2020 selalu mengalami kenaikan. Laju pengeluaran pemerintah di tahun 2016 sebesar 4.87 persen. Pada tahun 2017 naik sebesar 5.55 persen. Di tahun 2018 naik menjadi 5.90 persen. Di lanjut dengan kenaikan lagi di tahun 2019 sebesar 5.98 persen. Dan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 6.71 persen. Dilihat dari tren kenaikan pengeluaran pemerintah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 salah satu faktor yang memicu yaitu percepatan pelaksanaan program pemerintah seperti membangun infrastruktur, sekolah, pelayanan kesehatan dan lainnya. Pengeluaran pemerintah ikut serta membantu menanggulangi kemiskinan. Dengan adanya subsidi yang diberikan serta infrastruktur dan transportasi yang memadai memudahkan masyarakat serta kebutuhan logistik bahan pokok untuk mudah menjangkau daerah terpencil. Hal ini bisa menjadi faktor pendorong untuk menekan angka kemiskinan serta merelaksasikan harga barang atau jasa yang sebelumnya tinggi.

Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga -harga barang dalam periode waktu tertentu. Di Indonesia sendiri inflasi sering terjadi dikarenakan adanya Cost Push Inflation atau Inflasi yang terjadi karena dorongan biaya produksi sebagai akibat kenaikan bahan baku produksi. Untuk melihat lebih dalam berikut disajikan Gambar inflasi di Indonesia kurun waktu 2016 sampai dengan 2020:



Gambar 4. Perkembangan inflasi di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Data Diolah (2022)

Berdasarkan Gambar 4, menunjukkan Gambar pergerakan inflasi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuatif. Inflasi pada tahun 2016 sebesar 2.98 persen. Pada tahun 2017 inflasi mengalami kenaikan menjadi 3.27 persen. Kemudian pada tahun 2018 inflasi kembali naik menjadi 3.48 persen. di tahun 2019 inflasi mengalami penurunan menjadi 2.37 persen. Dan di tahun 2020 inflasi mengalami menurun kembali menjadi 1.55 persen. Pada tahun 2016 sampai 2018 inflasi mengalami kenaikan. Salah satu sebab kenaikan terjadi ialah harga bahan pangan yang cenderung naik. Kemudian tren penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 yaitu keberhasilan pemerintah dalam menekan harga yang bergejolak dari tahun ke tahun dan relatif terkendali.

Analisis pengaruh pengangguran, pengeluaran pemerintah dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2016-2020, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengangguran, pengeluaran pemerintah dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2016-2020 secara langsung yang dilakukan dengan program evIEWS 9 untuk menentukan uji pemilihan model estimasi sebagai berikut;

Tabel 1. Hasil Pengujian Uji Chow

Effects test	Statistic	d.f	prob
Cross-section F	100.238463	(32,127)	0.0000
Cross-section Chi-square	532.672617	32	0.0000

Sumber: Data diolah, 2022

Dari hasil uji chow menggunakan evIEWS 9 didapatkan nilai (Prob>F) sebesar 0,0000. Karena nilai (Prob>F) < alpha 0,05 maka H₀ ditolak dan model yang digunakan adalah fixed effect. Ketika model yang dipilih ialah fixed effect maka perlu dilakukan uji lagi yaitu uji hausman untuk mengetahui apakah sebaiknya memakai fixed effect model atau random effect model.

Tabel 2. Uji Hausman

Effects test	Statistic	d.f	prob
Cross-section random	100.238463	(32,127)	0.0000

Sumber: data diolah, 2022

Dari hasil uji hausman menggunakan evIEWS 9 didapatkan nilai (Prob>chi²) sebesar 0,0000. Karena nilai (Prob > chi²) < alpha 0,05 maka H₀ ditolak dan model yang digunakan adalah fixed effect.

Uji multikolinearitas ini dilakukan dengan melihat besaran VIF. Apabila $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas. Namun apabila nilai $VIF > 10$ maka berarti terdapat multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C		14.48287	NA
Pengangguran	1.83E+10	10.29553	1.128609
Pengeluaran	4.47E+08	2.394257	1.126047
Pemerintah	2.25E-17	7.081658	1.002900
Inflasi	1.06E+09		

Sumber: Data Diolah, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF seluruh variabel lebih kecil dari 10. Maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen. Uji autokorelasi digunakan untuk melihat korelasi antara data dengan data sebelumnya. Apabila nilai pada (Prob-F) memiliki nilai lebih besar dari alpha 0,05 maka tidak terdapat masalah autokorelasi. Sebaliknya apabila (Prob-F) lebih kecil dari alpha 0,05 maka terdapat masalah autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

F-Statistic	0.016888	Prob. F (2,157)	0.9833
Obs*R-squared	0.035067	Prob. Chi-Square (2)	0.9826

Sumber: data diolah, 2022

Dari hasil uji autokorelasi diatas didapatkan hasil nilai (Prob-F) lebih besar dari alpha 0,05 yang artinya tidak terdapat autokorelasi.

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji ketidaksamaan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian ini menggunakan metode Glejser dengan membandingkan (Prob-Chi2) dengan alpha. Apabila (prob-chi2) lebih besar dari alpha 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Sedangkan apabila (Prob-Chi) lebih kecil dari alpha 0,05 maka terjadi heterokedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

F-Statistic	0.346568	Prob. F (3.158)	0.7917
Obs*R-squared	1.059056	Prob. Chi-Square (3)	0.7870
Scaled explained SS	2.019296	Prob. Chi-Square (3)	0.5684

Sumber: data diolah, 2022

Dari hasil uji heterokedastisitas diatas didapatkan hasil nilai (Prob-Chi) lebih besar dari alpha 0,05 yang artinya tidak terjadi heterokedastisitas.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data dengan Eviews 9 sebagai aplikasih yang digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel independent, yaitu pengaruh pengangguran, pengeluaran pemerintah dan inflasi terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan. Dari hasil regresi diperoleh persamaan regresi yaitu: $Y_{it} = 655226.9 + 45870.09 X_{1it} - 1.04E-08.X_{2it} - 895.2084X_{3it} + \epsilon_{it}$

Berdasarkan persamaan hasil regresi di atas dapat di artikan sebagai berikut:

- Nilai konstansan di tandai dengan (Y) yang artinya bahwa variabel Kemiskinan (Y) sebesar 655226.9 dengan mengasumsikan bahwa variabel yang lain dianggap nol atau tidak ada.
- Nilai 45870 artinya Pengangguran (X1) jika terjadi kenaikan Pengangguran (X1) sebesar satu satuan maka akan meningkatkan Kemiskinan (Y) sebesar 45870
- Nilai 1.04E-08 artinya Pengeluaran Pemerintah (X2) jika terjadi kenaikan Pengeluaran Pemerintah (X2) sebesar satu satuan maka akan menurunkan Kemiskinan (Y) sebesar 1.04E-08

- d. Nilai 895.2084 artinya Inflasi (X3) jika terjadi kenaikan Inflasi (X3) sebesar satu satuan maka akan menurunkan Kemiskinan (Y) sebesar 895.2084.

Dalam menguji pengaruh variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen dilakukan uji F. pada penelitian ini menguji apakah variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent. Penelitian ini menghasilkan nilai prob-F < 5% yang menunjukkan signifikan sehingga H0 ditolak. Yang berarti secara bersama-sama variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dengan menggunakan F-tabel dengan taraf 5% diperoleh hasil sebesar 2,66. Dan pada uji f hitung sebesar 579.6404, maka dapat disimpulkan bahwa $F_{Hitung} > F_{Tabel}$, nilai uji F terletak pada daerah menolak H0 ($F_{Hitung} > F_{Tabel}$), ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat:

Tabel 5. Hasil Uji T-Statistik

Variabel	T-Hitung	T-Tabel	keterangan
Pengangguran	3.559197	1.97490	Signifikan
Pengeluaran	-2.062619	1.97490	Signifikan
Pemerintah Inflasi	-0.116989	1.97490	Tidak Signifikan

Sumber: data diolah, 2021

- a. Variabel Pengangguran X1

Antara variabel Pengangguran dan kemiskinan menghasilkan nilai probabilitas dengan nilai 0.0005 yang berarti variabel Pengangguran memiliki nilai prob < 0,05 maka variabel Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Dengan menggunakan T-Tabel dengan taraf 5% diperoleh hasil sebesar 1,97490. Dan pada uji T-Hitung sebesar 3.559197 maka dapat disimpulkan bahwa $T\text{-Hitung} > T\text{-Tabel}$. Nilai uji T terletak pada daerah menolak H0 ($T\text{-Hitung} > T\text{-Tabel}$), ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti variabel Pengangguran mempunyai pengaruh terhadap variabel kemiskinan.

- b. Variabel Pengeluaran Pemerintah X2

Antara variabel Pengeluaran Pemerintah dan kemiskinan menghasilkan nilai probabilitas dengan nilai 0,0412 yang berarti variabel pengeluaran pemerintah memiliki nilai prob < 0,05 maka variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan. Dengan menggunakan T-Tabel dengan taraf 5% diperoleh hasil sebesar 1,97490. Dan pada uji T-Hitung sebesar -2.062619. maka dapat disimpulkan bahwa $T\text{-Hitung} > T\text{-Tabel}$. Nilai uji T terletak pada daerah menolak H0 ($T\text{-Hitung} > T\text{-Tabel}$), ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah mempunyai pengaruh terhadap variabel kemiskinan.

- c. Variabel Inflasi X3

Antara variabel Inflasi dan kemiskinan nilai probabilitas dengan nilai 0.9071 yang berarti variabel Inflasi nilai prob > 0,05. Maka variabel Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan.

Dengan menggunakan T-Tabel dengan taraf 5% diperoleh hasil sebesar 1,97490, dan pada uji T-Hitung sebesar -0.116989. maka dapat disimpulkan bahwa $T\text{-Hitung} < T\text{-Tabel}$. Nilai uji T terletak pada daerah menerima H1 ($T\text{-Hitung} < T\text{-Tabel}$) ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti bahwa variabel Inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel kemiskinan.

R^2 digunakan untuk melihat kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen. Penelitian ini menghasilkan nilai R^2 sebesar 0.993779 yang menggambarkan bahwa kemampuan variabel independent (Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, Dan Inflasi) untuk menjelaskan variabel dependen (kemiskinan) sebesar 99,37%. Sedangkan 0,63% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Berdasarkan hasil analisa data bahwa dampak dari pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan. Pengangguran berdampak pada penurunan pendapatan dan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Timbulnya pengangguran memiliki kaitan dengan adanya tenaga kerja. Dimana saat seseorang yang siap bekerja tetapi tidak diimbangi oleh pertumbuhan lapangan kerja yang memadai, sehingga membuat seseorang tersebut menganggur dan kesulitan akan mendapatkan penghasilan. Sejalan dengan pendapat Malik (2013) dan Mahendra (2020) dimana pengangguran memiliki keterkaitan dengan tenaga kerja dimana pesatnya angkatan kerja tidak di sertai dengan percepatan pertumbuhan lapangan kerja. Yang berarti pengangguran terjadi akibat dari ketidakseimbangan dalam mekanisme pasar tenaga kerja.

Hasil ini menguatkan kembali pada hasil dari penelitian terdahulu yang menyatakan pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan. Retnowati, dan harsuti (2017) dan Putri (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran dapat menurunkan tingkat pendapatan dan juga menurunkan tingkat kemakmuran yang mereka capai. Sehingga jika masyarakat tidak bekerja atau menganggur, maka konsekuensinya tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik dan menyebabkan para pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya.

Berdasarkan hasil analisa data bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan. Pemerintah sebagai pemegang instrumen anggaran memiliki hak penuh atas tindakan untuk mengatur jalannya perekonomian, yang di gunakan untuk mengalokasikan anggaran belanja pada suatu kepentingan publik. Terkhususnya bagi masyarakat miskin sehingga kebijakan anggaran tersebut dapat mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Sejalan dengan pendapat dari (Sukirno, 2013; Sangkaen et al., 2021) dimana pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang mengatur perekonomian melalui instrumen anggaran. Dan digunakan untuk mengalokasikan anggaran pada kepentingan publik khususnya untuk rakyat miskin. Sehingga kebijakan anggaran tersebut tepat sasaran dan mampu mengurangi kemiskinan.

Hasil ini menguatkan pada penelitian terdahulu yang menyatakan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Nengah & Made (2019) melakukan penelitian terhadap pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di kabupaten kota provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Secara langsung pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang atau jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk atau jasa lebih banyak.

Berdasarkan hasil analisa data bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan inflasi tidak begitu banyak menyumbang kemiskinan, dimana penduduk miskin tidak akan terpengaruh pada tingkat inflasi didasarkan pada penduduk miskin tidak memiliki daya beli yang cukup. Sehingga walaupun terjadi inflasi mereka tetap tidak memiliki daya beli yang cukup. Sehingga walaupun terjadi inflasi mereka tetap tidak memiliki daya beli yang memadai (Endrayani & Dewi, 2016).

Hasil ini menguatkan pada penelitian terdahulu yang menyatakan inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Kolibu, Eumate & Engka (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat inflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi bukanlah salah satu indikator yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Penduduk miskin tidak terpengaruh oleh inflasi karna pada dasarnya mereka tidak memiliki daya beli

yang cukup, sehingga walaupun terdapat inflasi mereka tetap tidak memiliki daya beli. Namun pemerintah tetap mengontrol dan menjaga inflasi agar kenaikan harga barang tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia dengan periode 2016-2020. Dengan menggunakan regresi data panel Adapun Kesimpulan dalam penelitian ini ialah Pertama Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa variabel independen (pengangguran, pengeluaran pemerintah) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (kemiskinan). Sedangkan variabel independen (inflasi) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (kemiskinan) jadi apabila kedua variabel independen mengalami kenaikan secara bersama-sama maka variabel dependen (kemiskinan) juga akan naik. Diperoleh hasil F-Tabel dengan taraf 5% sebesar 2,66. Dan pada uji F-Hitung sebesar 579.6404.

Kedua, Dari hasil uji Regresi menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan apabila pengangguran pada suatu daerah naik maka menyebabkan kenaikan pada kemiskinan di daerah tersebut. Di peroleh nilai probabilitas sebesar 0.005 dengan menggunakan t-tabel dengan taraf 5% diperoleh hasil sebesar 1.97490. Dan pada t-hitung sebesar 3.559197.

Ketiga, Dari hasil uji regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah menurun maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Di peroleh nilai probabilitas sebesar 0,0412. Dengan menggunakan t-tabel dengan taraf 5% diperoleh hasil sebesar 1.97490. Dan T-Hitung sebesar -2.062619.

Keempat, Dari hasil uji regresi menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan apabila di suatu daerah inflasi mengalami perubahan maka akan tidak akan berpengaruh terhadap kemiskinan di suatu daerah tersebut. Diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,9056. Dengan menggunakan T-Tabel dengan taraf 5% diperoleh sebesar 1.97490. Dan t-hitung sebesar 3.559197.

Adapun penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penelitian yaitu Pertama, Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan ada banyak sekali, akan tetapi dalam penelitian ini hanya mengambil 3 variabel saja. Kedua, Periode penelitian hanya diambil 5 tahun, sehingga hasil yang diperoleh kemungkinan tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya. Ketiga, Penelitian hanya mengestimasi dalam jangka pendek, sehingga dalam jangka panjang hasil penelitian belum tentu sama dengan penelitian yang dilakukan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. (2012). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 10(2), 158-169.
- Barika, B. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Se-Sumatera. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, 5(1), 27-36.
- Endrayani, N. K. E., & Dewi, M. H. U. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(1), 63-88.
- Gilarso, T. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonomika Dasar*. Jakarta: Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, D. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

- Jannah, F. (2019). Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah serta Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (Jiem)*, 3(3).
- Kasim, R., Engka, D. S., & Siwu, H. D. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Kasiram, M. (2008). *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Malang Pers.
- Lestari, D. P., Junaidi, J., & Aminah, S. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 7(2), 56-67.
- Mahendra, A. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Inflasi dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 174-186.
- Mustamin, S. W., & Nurbayani, S. U. (2015). Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap Kemiskinan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis*, 4(2), 165-173.
- Pratama, N. R. N. S., & Utama, M. S. (2019) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.8, 651-680. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/50877>
- Putri, E. M., & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 10(2), 106-114.
- Putri, S. R. S. (2019). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1990-2018* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Rahardja, P., Manurung, M. (2008). *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar. Edisi Keempat*. Jakarta: LP-FEUI
- Retnowati., H. (2016) Pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi* Vol.6, No.1. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/956>
- Sangkaen, D., Masinambow, V. A., & Engka, D. S. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi Belanja Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(2), 17-33.
- Sinaga, R. V. I. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera. *Jurnal Implementasi Ekonomi dan Bisnis*, 9(1).
- Sunusi, D. (2014). Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara Tahun 2001-2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2).
- Waruwu, S. J. A. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Investasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2014. *Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*.